

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan sering diartikan sebagai tidak mempunya seseorang dalam memenuhi sejumlah kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan, serta rendahnya kemampuan Sumber daya Manusia (SDM). Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (BAPENAS).

Menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan kemiskinan diantaranya:

1. Menurut Ritonga (2003) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dengan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya secara layak.

2. Menurut Suprlan (1984), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai seorang miskin.
3. Menurut Rangga Pratiwi (2009), kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, pendidikan akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Dari ketiga pengertian ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi individu, keluarga ataupun kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar yang lain, jadi kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan sosialnya rendah.

2.1.1.2 Teori Penyebab Kemiskinan

Sharp, dkk (dikutip dari Kuncoro, 2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. **Pertama**, secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang. **Kedua**, Kemiskinan karena perbedaan akses modal. **Ketiga**, kemiskinan adanya perbedaan akses modal. Dari ketiga penyebab kemiskinan tersebut bisa dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (*vinicious circle of poverty*).

Nurkse (dalam Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah



Sumber : Mudrajad Kuncoro 2006

Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Nurkse menjelaskan kemiskinan merupakan keterkaitan beberapa faktor yang akan berujung pada kemiskinan. Gambar diatas dapat menjelaskan pendapat Nurkse yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia memang miskin)

Menurut spicker (dalam Wahendra, 2014) penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam 4 mazhab yang berbeda:

1. *Individual Explanation*, kemiskinan dalam terminology karakteristik orang miskin itu sendiri, yaitu hasil dari kemalasaan, kekurangan atau kecacatan, seorang miskin karena membuat kesalahan pilihan memiliki anak pada waktu yang tidak tepat gagal untuk bekerja dan sebagainya.

2. *Familial Explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana terdapat warisan pada generasi selanjutnya sehingga terjadi ketidakberuntungan yang berulang terus ke generasi selanjutnya, baik dalam warisan asuhan dan pendidikan.
3. *Structural Explanation*, kemiskinan karena pola perilaku, tapi lebih disebabkan oleh keadaan pada pilihan personal.
4. *Structural Explanation*, mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil dari masyarakat di tempat tersebut. Kemiskinan menciptakan suatu ketidakmerataan yang ditunjukkan oleh adanya divisi sosial, kelas status dan kemampuan.

2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan garis kemiskinan yang merupakan penjumlahan dari batas kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan untuk melihat kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang rutin dikonsumsi penduduk yang kemudian disertakan dengan 2100 kilo kalori perkapita per hari. Garis kemiskinan non makanan terpilih meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Oleh karena itu penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dimasukkan ke dalam kelompok penduduk miskin.

Rumus perhitungan garis kemiskinan:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana : GK : Garis Kemiskinan
 GKM : Garis Kemiskinan Makanan
 GKNM : Garis Kemiskinan Non Miskin

Berikut adalah formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan makanan (GKM) dari BPS:

$$GKM_{*jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM_{*jp} : Garis Kemiskinan Makanan Daerah j (sebelum disertakan menjadi 2100 kilo kalori) provinsi p
 P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p
 Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p
 V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p
 J : Daerah (perkotaan atau pedesaan)
 P : Provinsi ke- p

Formula nilai kebutuhan minimum non makanan dari hasil Survei Paket

Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n \gamma_{kj} V_{kjp}$$

Dimana :

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah j dan provinsi p
 V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non makanan daerah j dan provinsi p

Y_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non makanan terpilih

j : Daerah (perkotaan atau pedesaan)

p : Provinsi ke- p

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada dasarnya kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diartikan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara cukup. Apabila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatasan antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjalin kelangsungan hidup (Todaro, 1997 dalam Lancolin Arsyad, 2004)

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif merupakan kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, pada lingkungan orang yang bersangkutan. Walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar

minimum, akan tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

2.1.2.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah merupakan semua anggaran yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan negara/daerah dalam rangka menjalankan fungsinya (Idris, 2016). Total pengeluaran pemerintah merupakan perjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah (pusat-provinsi-daerah) (Lee Rober,Jr and Ronald W.Johnson, 1998).

Bigsten dan Levin (2002) mengemukakan bahwa komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan faktor penentu dalam pembangunan manusia. Pendidikan memiliki peranan penting dalam sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dalam Undang Undang No 27 Tahun 2014 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan atau disebut dengan pengeluaran pendidikan adalah alokasi anggaran fungsi pendidikan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 dijelaskan bahwa anggaran pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 20% APBN dan atau APBD.

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasarkan kepada kapasitas produksi tenaga manusia dalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat

menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah. Asumsi ini digunakan dalam teori *human capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk meningkatkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori *human capital* dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurut E.Setiawan (2006) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam hubungannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan semakin tinggi kualitas hidup atau investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.2.2 Sumber Sumber Pembiayaan Sektor Pendidikan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari :

1. Pemerintah Daerah

Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja. Daerah untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Dana Masyarakat

Termasuk dana dari orang tua atau masyarakat atau dunia usaha maka diupayakan untuk membiayai kegiatan peningkatan mutu melalui program pengayaan dan program khusus yang disepakati orang tua.

3. Sumber Lain

Misalnya hibah, pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Kesehatan

2.1.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan pengeluaran yang dialokasikan khusus untuk bidang kesehatan. Pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya dalam bidang kesehatan dibiayai menggunakan anggaran ini. Dalam Undang Undang No.36 tahun 2009 dijelaskan lebih lanjut bahwa tanggungjawab pemerintah dibidang kesehatan meliputi pelayanan publik. Layanan publik di bidang kesehatan ini berhak diperoleh oleh setiap rakyat Indonesia secara adil guna memperoleh tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya.

Biasanya negara berkembang memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak mampu membeli fasilitas kesehatan yang notabene disediakan oleh pihak swasta. Dalam kasus ini, fasilitas kesehatan menjadi salah satu barang publik, dimana pihak swasta tidak akan mau menyediakannya. Maka dari itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam lingkungan negara berkembang untuk turut meningkatkan derajat kesehatan rakyatnya.

Kesehatan adalah salah indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa program pemerintah yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan adalah program kesehatan gratis, asuransi kesehatan, dan penggunaan kartu miskin.(Misdawati,2013).

Menurut Wahid (2012:85) Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Basitas (2011:50) mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upacara secara berharap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) sektor ekonomi adalah satu variabel pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi dan net-ekspor

(ekspor dikurangi impor). Kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah dalam perekonomian dalam rangka mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Intervensi pemerintah, yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah.

Bentuk hubungan negatif yang terjadi di Indonesia terutama Kota Tasikmalaya antara peningkatan (anggaran belanja) dengan kemsikinan dan pengangguran ini sejalan dengan pemikiran ekonomi ekonomi aliran Keynesian. Dimana mereka mendasari pemikiran bahwa variabel pemerintah (hususnya anggaran) dianggap salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nantinya hal ini diharapkan akan menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect* pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi.

2.1.5 Teori Pengeluaraan Pemerintah

1. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment (pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. (Boediono,1999)

2. Teori Mikro

Tujuan dari Teori Mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor faktor- yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Hubungan antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Beberapa Teori Pengeluaran Pemerintah Sebagai Berikut:

- a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.
Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam persentase GDP semakin besar dan persentase investasi pemerintah

dalam persentase terhadap GDP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Teori Adolf Wegner

Adolf Wegner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatkan peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peranan pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi permintaan.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal

masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut “Kemiskinan”. Melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi perbandingan dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul Penelitian/Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tri Mulyani (2009) Analisis Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sumber: Jurnal Ekonomi, Volume 3, No.4 Universitas Negeri Semarang.	Menggunakan variabel Y, dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran anggaran pendidikan dan kesehatan	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu Pengeluaran Pemerintah sektor ekonomi dan jumlah penduduk	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Evi Novitasari (2015). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, PDRB Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Sumber: Jurnal Akuntansi, Volume 2, No.2 (Oktober):17-32.	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan, dan variabel X yang sama belanja sektor pendidikan dan sektor kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengeluaran pemerintah sektor ekonomi dan PDRB.	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran perkapita dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan.
3	Nadia Ayu Bhakti(2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia periode 2008-2012. Sumber: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 18, No4. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan, dan menggunakan variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengeluaran pemerintah sektor ekonomi, PDRB, dan rasio ketergantungan	Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan dan sektor Kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sedangkan PDRB berpengaruh negatif dan rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.
4	Aan Zulyanto (2018). Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Sumber: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 1, No. 1. Universitas Hazairin.	Menggunakan variabel Y yaitu Kemiskinan dan variabel X yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengeluaran Pemerintah sektor ekonomi	Hasil analisis menunjukkan anggaran pendidikan berpengaruh positif terhadap Kemiskinan, sedangkan anggaran kesehatan dan infrastruktur berpengaruh negatif namun tidak signifikan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Muliza T.Zulham dan Cheny Seftarita (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan,Belanja Kesehatan ,dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Sumber: Jurnal Ekonomi Volume 18, No.2. Aceh: Universitas Syiah Kuala.	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan,dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengeluaran pemerintah sektor ekonomi dan PDRB.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan,dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.
6	Zul Putra S. (2017) Analisis Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Luwu. Sumber: Jurnal Riset Edisi XIV Volume 3, No 003. Makassar: Universitas Bosowa.	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan,dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan,dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengeluaran perkapita, dan pengeluaran pemerintah sektor ekonomi.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Luwu.
7	Eka Agustina, Eny Rochada, Yana Ulfah (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan,dan variabel X yang sama yaitu Pengeluaran Pemerintah	Menggunakan variabel X yang berebda yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi.	Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan peningkatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Bruto serta Kemiskinan di Kalimantan Timur.</p> <p>Sumber: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen Volume 12, No.2. Samarinda: Universitas Mulawarman.</p>	<p>Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan</p>	<p>pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kalimantan Timur.</p>		
8	<p>Puti Andiny dan Merlindiana Gus Puja Sari (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kota Langsa.</p> <p>Sumber: Jurnal Samudra Ekonomika Volume 2, No.2. Aceh: Universitas Samudra.</p>	<p>Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan, dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan.</p>	<p>Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengeluaran pemerintah sektor ekonomi.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh positif dan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Langsa.</p>
9	<p>Cliff Laisana Vecky Masinambow, Wensy Rompas (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB dan Kemiskinan Di Sulawesi Utara</p>	<p>Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan, dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan.</p>	<p>Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengeluaran pemerintah sektor ekonomi.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi untuk sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan sektor Kesehatan tidak Signifikan baik secara parsial ataupun simultan.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahun 2002-2013.				
Sumber: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15, No.4. Manado: Universitas Sam Ratulangi.				
10	Meyliana Astri, S.Pd, Sri Indah Nikensari, S.E,M.Si, Dr. Harya kuncara W, SE,M.Si (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia.	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu Pengeluaran pemerintah sektor ekonomi	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan secara serempak berpengaruh positif terhadap Kemiskinan.
Sumber: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Volume 1, No.1. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.				
11	Sal Diba Susen Pake, Georage M.V Kawung dan Antonius Y.Luntungan (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan, dan variabel X yang sama yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif namun kurang signifikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, dan pengeluaran

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Halmahera Utara. Sumber: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 18, No.04. Manado: Universitas Sam Ratulangi.	Kesehatan.		pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh pada Kemiskinan.
12	Rahmah Amalia, Madris, Abd. Rahman Razak (2015) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Sumber: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 18, No.2. Samarinda: Universitas Mulawarman.	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan, dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor Ekonomi dan sektor kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu jumlah penduduk	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.
13	Abdul Kadir Mahulauw, Dwi Budi Santosa dan Putu Mahardika (2016). Pengaruh Pengeluaran Kesehatan, Pendidikan serta	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan, dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu infrastruktur, pengeluaran pemerintah sektor ekonomi.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap

(1)	Infrastruktur Terhadap	sektor pendidikan	(4)	Kemiskinan.	(5)
	Kemiskinan. Sumber: Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 2, No. 1.	dan sektor kesehatan.			
14	Nur Baeti (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sumber: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 2, No.3. Semarang: Universitas Negeri Semarang.	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan, dan variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengangguran ,pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor ekonomi.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi,pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan.	
15	Septian M.M Sanggalora,Vekie Rumate Hanly F, Siwu (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. Sumber: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15, No.02. Manado	Menggunakan variabel Y yang sama yaitu Kemiskinan,da n variabel X yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan.	Menggunakan variabel X yang berbeda yaitu pengeluaran pemerintah sektor ekonomi.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan,sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.	

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi.

2.3.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pendidikan Dengan Kemiskinan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dimana pemenuhanya mengindikasikan tingkat kesejahteraan. Pemerataan pendidikan juga merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan diharapkan mampu menaikkan kualitas pendidikan suatu negara. Wujud dari peningkatan pendidikan ada beberapa macam, misalnya saja kenaikan angka rata-rata sekolah dan kenaikan angka melek huruf. Meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan maka biaya masyarakat harus menurun dengan demikian kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan menjadi lebih meningkat, minat sekolah pun akan meningkat dan taraf pendidikan akan meningkat dan kemiskinan suatu wilayah pun akan menurun, maka pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

2.3.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dengan Kemiskinan

Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai penyedia barang publik. Pada tahap yang lebih lanjut, barang publik merupakan infrastruktur, pemerintah menggunakan pengeluaran pemerintah yang salah satu pendananya berasal dari pajak

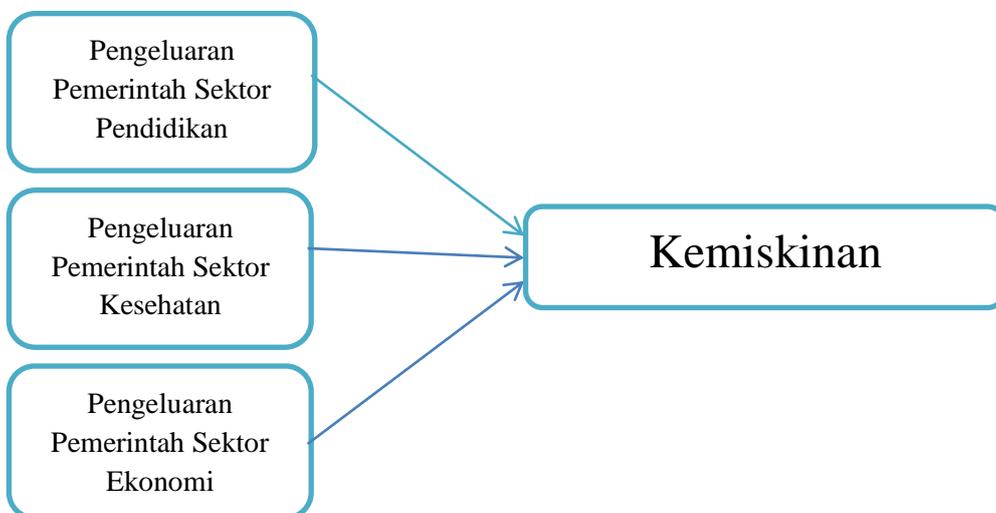
Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan digunakan untuk membangun, memelihara dan meningkatkan sarana serta prasarana kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mengindikasikan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan agar kesehatan masyarakat meningkat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini tercermin dalam naiknya angka harapan hidup, turunnya nilai kematian bayi, turunnya angka kematian ibu melahirkan, dll. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat akan menurunkan kemiskinan, maka pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

2.3.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi kaitanya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ataupun Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Hasil PDRB yang menyebar di setiap golongan masyarakat termasuk di golongan penduduk miskin merupakan syarat pengurangan penduduk miskin. PDRB dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang bersifat negatif.

Produk Domestik Regional Bruto yang meningkat akan mengurangi tingkat kemiskinan sehingga percepatan peningkatan PDRB penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Dari ketiga hubungan antar variabel di atas yang merupakan variabel independent, dengan kemiskinan sebagai variabel Dependent akan diregres untuk menguji tingkat signifikansi pada setiap variabel Independent dalam mempengaruhi kemiskinan. Keempat variabel tersebut digambarkan dalam kerangka pemikiran pada Gambar 2.2



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan Gambar 2.2 maka dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor

ekonomi secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2007 hingga 2019.

2. Diduga pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor ekonomi secara bersama sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2007 hingga 2019.